

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat besar dan kehidupan masyarakat serta budayanya sangat beragam. Persatuan bangsa Indonesia tidak hanya didasarkan pada kesamaan latar belakang sosial budaya, geografis dan sejarah, tetapi juga pada kesatuan ideologi, pandangan dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Pandangan hidup, ideologi, dan falsafah bangsa Indonesia secara komprehensif tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar bangsa Indonesia. Sementara itu, kesatuan pandangan, ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia tergambar jelas dalam lambang negara 'Bhinneka Tunggal Ika'. Artinya "berbeda (suku, agama, bahasa) tetapi satu (Indonesia)".

Awal 2016, ketenangan warga Ibu Kota terusik. Kawasan Jalan MH Thamrin, Sarinah, Jakarta, Kamis tanggal 14 Januari 2016, diserang sekelompok teroris yang melakukan pengeboman disertai dengan penembakan. Aksi teror ini diawali oleh salah satu pelaku yang melakukan bom bunuh diri. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 10.39 WIB di kedai kopi *Starbucks*, *Theater* Djakarta. Selain melukai beberapa orang, ledakan tersebut menghancurkan kafe itu. Siang itu, kondisi arus lalu lintas di depan gerai *Starbucks*, Jalan MH Thamrin, baik dari arah Bundaran Hotel Indonesia ke Istana Negara, maupun sebaliknya, masih normal. Setelah aksi teror di *Starbucks*, selang 11 detik berikutnya, ledakan bom kedua terjadi. Pelaku lainnya, menyerang pos polisi yang ada di dekat Gedung Sarinah (Pratama, 2016). Dalam peristiwa bom Sarinah – Thamrin ini, sebanyak 21 orang menjadi korban.

Publik kembali terhenyak ketika serangkaian ledakan terjadi di Surabaya dan Sidoarjo pada pertengahan Mei 2018, tepat sebelum umat muslim menyambut bulan suci Ramadhan. Palsalnya, sebelum kejadian ini terjadi kerusuhan di Mako Brimob, Depok antara narapidana teroris dan Polisi yang menewaskan beberapa personil Brimob. Menurut para pengamat terorisme, rusuh di Mako Brimob

memberikan inspirasi kepada jaringan kelompok teror untuk “balas dendam”. Diskursus yang kemudian mengemuka di masyarakat adalah apakah kejadian ini merupakan “kecolongan” pihak intelijen Indonesia? Di mana lembaga-lembaga intelijen, sehingga tidak mampu mendeteksi serangan mendadak seperti ini (Kristimanta, 2018).

Kejadian diatas menjadikan stigma yang tertanam dibenak masyarakat, yaitu apabila ada sebuah kejadian terorisme maupun bentuk kejahatan berskala besar lain, maka yang menjadi “kambing hitam”-nya adalah intelijen. *Indonesia Police Watch* (IPW), melalui ketua Presidiumnya, Neta S.Pane (2019) mengeluarkan pernyataan :

"Meski Densus 88 terus-menerus melakukan penangkapan dan pembersihan ke sarang-sarang terorisme, tapi para teroris tetap mencari celah untuk melakukan serangan dan para teroris tidak pernah takut pada penangkapan maupun penggerebekan yang dilakukan Polri terhadap mereka,"(Ryn dan Tim, 2019)

Indonesia Police Watch (IPW) menilai masifnya penangkapan terduga teroris usai bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan yang terjadi pada hari Rabu, 13 November 2019. Ledakan yang terjadi di Polretabes Medan sebagai pesan bahwa terorisme di Indonesia masih hidup. Peristiwa tersebut merupakan kali pertama yang terjadi di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penangkapan terhadap para terduga teroris belakangan ini tidak meredupkan eksistensi mereka, justru sebaliknya (Ryn dan Tim, 2019).

Mengingat betapa pentingnya peran intelijen dalam menghadapi situasi dan kondisi ancaman teror serta aksi-aksi terorisme lainnya yang terus menerus terjadi, akhirnya dibentuklah sebuah satuan anti teror kepolisian yang bertugas dalam menindak segala bentuk ancaman terorisme dan melakukan deteksi dini terhadap ancaman gangguan Kamtibmas yang berkaitan dengan aksi terorisme.

Fajri, Raharjo dan Monica (2018) menyatakan bahwa, Polri sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penindakan sebagai hukum membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88/AT). Tugas Densus 88/AT adalah menangani segala bentuk ancaman teroris termasuk diantaranya ancaman bom dan penyanderaan. Dalam menangani ancaman

dan aksi teroris, Densus 88/AT memerlukan laporan intelijen sebagai informasi awal untuk melakukan tindakan. Intelijen menjadi salah satu kunci pemberantasan tindak pidana terorisme. Bukti awal dari laporan intelijen memberikan kewenangan Densus 88/AT untuk melakukan penangkapan. Fungsi intelijen dalam struktur organisasi dari Densus 88/AT sangat strategis.

Polri harus menyiapkan sumberdaya manusia pada satuan intelijen yang memiliki kompetensi sebagai agen lapangan yang nantinya akan berhadapan dengan situasi yang berbahaya. Menjadi agen lapangan harus bersifat *klandestin*, menguasai medan serta mampu membaca berbagai macam situasi, karena apabila seorang agen lapangan tidak memiliki kemampuan dasar sebagai agen lapangan, tentu akan sangat berbahaya apabila agen tersebut memberikan laporan yang salah kepada pimpinannya, sehingga pimpinan juga salah dalam menentukan aksi selanjutnya.

Untuk memenuhi kebutuhan akan seorang personel intelijen yang memiliki kompetensi yang siap terjun dalam "*silent war*", dan sudah bergabung ataupun akan bergabung pada Densus 88/AT, salah satu faktor penting untuk dapat mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Pendidikan Polri dilaksanakan dalam upaya membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia Polri yang diharapkan. Sesuai yang tertuang dalam Perkap Nomor 14 (2015) tentang Sistem Pendidikan Polri, maka yang dimaksud Pendidikan Polri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik di lingkungan Polri.

Proses pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan pada Polri dilaksanakan dan berada dibawah kendali Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang selanjutnya disebut dengan Lemdiklat Polri, merupakan unsur pendukung pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri dengan tugas merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan kepolisian dalam rangka "Menciptakan Insan Tri Brata yang bermoral dan Profesional", berdasarkan jenis pendidikan Polri yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis dan vokasi

serta mengelola komponen pendidikan di jajaran lembaga pendidikan & pelatihan (Lemdiklat) Polri (Perkap Nomor 14, 2015).

Adapun jenjang pendidikan Polri terbagi atas 2 bagian, yaitu jenjang pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan. Dalam jenjang pendidikan pembentukan (yang selanjutnya disebut Diktuk) yaitu membentuk anggota Polri dengan pangkat Tamtama, Bintara, Akademi Kepolisian (Akpolti), Sekolah Pembentukan Perwira dan Sekolah Inspektur Pendidikan Sumber Sarjana (SIPSS). Dan untuk tingkat pendidikan pengembangan (yang selanjutnya disebut dengan Dikbang), berupa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri (Sespimma), Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen), dan Sekolah Staf Perwira Tinggi (Sespati) (Fita, 2018).

Lemdiklat Polri memiliki 8 (delapan) pusat pendidikan (Pusdik Sabhara, Pusdik Brimob, Pusdik Binmas, Pusdik Lantas, Pusdiklat Serse/ Diklatsus Jatrans, Pusdik Polair, Pusdikmin dan Pusdik Intelijen), serta 4 (empat) sekolah (Sespim, STIK – PTIK, Sekolah Polisi Wanita dan Sekolah Bahasa). Untuk jenjang pendidikan pembentukan Bintara Polri, dilaksanakan pada Sekolah Polisi Negara yang berada dibawah kendali masing-masing Kepolisian Daerah (Polda) dalam bidang anggarannya, namun kendali koordinasi berada di bawah Lemdiklat Polri sebagai pembina fungsi. Proses Diktuk yaitu sebuah proses perubahan *mindset* dan *culture set* dari masyarakat biasa menjadi calon anggota Polri. Proses tersebut dilakukan secara sistematis dan terukur guna menghasilkan Bintara Polri sebagai Brigadir Polisi dua yang mampu melaksanakan tugas Samapta Bhayangkara yang tanggap, tanggon, trengginas dan modern (Lemdiklat Polri, 2019).

Selain untuk membentuk anggota Polri melalui Diktuk, Dikbang juga dilaksanakan di pusat pendidikan yang berada dibawah Lemdiklat Polri. Dikbang adalah pendidikan lanjutan setelah Diktuk yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri pada Polri agar memiliki pengetahuan, sikap perilaku kepemimpinan dan keterampilan teknis. Dikbang sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis pendidikan yaitu Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum) serta Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes).

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 (2015) menyebutkan bahwa :

“ Pendidikan Pengembangan Spesialisasi yang selanjutnya disingkat Dikbangspes adalah pendidikan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan khusus fungsi Kepolisian. Dikbangspes berdasarkan jenjang pendidikan meliputi :

1. Tamtama Polri;
2. Bintara Polri/ PNS Gol II;
3. Perwira Pertama Polri/ PNS Gol III;
4. Perwira Menengah Polri/PNS Gol IV.

Dikbangspes, meliputi fungsi:

1. operasional;
2. pembinaan; dan
3. Bantuan Teknis (Bantek).”

Dikbangspes diselenggarakan secara bertingkat meliputi tingkat dasar dan tingkat lanjutan yang disusun mengacu pada kompetensi dan hasil analisis kebutuhan tugas dan jabatan pada masing-masing unit organisasi Polri. Dikbangspes diselenggarakan di Satuan Pendidikan Polri yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri. Dikbangspes diselenggarakan oleh Lemdikpol dengan pembina fungsi Kepolisian tingkat Mabes Polri sebagai penanggung jawab materi.”

Pusdik Intelijen Lemdiklat Polri merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kalemdiklat Polri. Pusdik Intelijen bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang khusus yaitu bidang intelijen (Perpol Nomor 5, 2019). Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di Pusdik Intelijen pada tahun anggaran 2020, yaitu :

a. Perwira :

- 1) Dikbangspes perwira pertama penggalangan intelijen;
- 2) Dikbangspes perwira pertama kontra intelijen;
- 3) Dikbangspes perwira produk intelijen;
- 4) Dikbangspes perwira pertama Tukbinjar intelijen;
- 5) Dikbangspes perwira pertama interogasi;
- 6) Dikbangspes perwira pertama pengamanan intelijen;
- 7) Dikbangspes perwira pertama penyelidikan intelijen;
- 8) Dikbangspes perwira pertama intelijen teknologi;
- 9) Dikbangspes perwira pertama penyusupan intelijen;
- 10) Dikbangspes perwira pertama analisis intelijen; dan
- 11) Dikbangspes perwira pertama kontra intelijen;

b. Bintara :

- 1) Dikbangspes bintara dasar intelijen (Densus 88 AT Polri);
- 2) Dikbangspes bintara penggalangan intelijen;
- 3) Dikbangspes bintara penyelidikan intelijen;
- 4) Dikbangspes bintara intelijen teknologi;
- 5) Dikbangspes bintara dasar intelijen (Polair);
- 6) Dikbangspes bintara dasar intelijen;
- 7) Dikbangspes bintara interogasi;
- 8) Dikbangspes bintara penyusupan;
- 9) Dikbangspes bintara pengamanan intelijen;
- 10) Dikbangspes bintara produk intelijen;
- 11) Dikbangspes bintara kontra intelijen;
- 12) Dikbangspes bintara dasar intelijen (Brimob);
- 13) Dikbangspes unit opsnal penyelidikan intelijen; dan
- 14) Dikbangspes bintara tukbinjar intelijen (Lemdiklat Polri, 2019).

Dikbangspes pada Pusdik Intelijen dilaksanakan selama 2 (dua) bulan pendidikan. Selama masa pendidikan, peserta didik diwajibkan untuk tinggal di Pusdik Intelijen. Materi – materi yang diberikan sesuai dengan Dikbangspes yang dipilih oleh masing – masing peserta didik dengan jumlah jam pelajaran yang diterima yaitu 400 jam pelajaran.

Kendati begitu banyaknya kesempatan Dikbangspes pada fungsi intelijen, namun pada kenyataan di lapangan, banyak diantara para Bintara – Bintara pengembang fungsi intelijen bertugas tanpa terlebih dahulu mengikuti Dikbangspes Bintara Dasar Intelijen, dengan kata lain, mereka langsung diterjunkan untuk langsung untuk berdinam dengan mengemban fungsi intelijen. Hal ini tentu sangat menjadi kendala, karena dasar intelijen merupakan pengetahuan skala paling awal ketika memasuki dunia intelijen dan bagaimana anggota intelijen melakukan *surveillance*, melakukan desepsi dan lain sebagainya yang menjadi *skill* dasar sebagai seorang anggota intelijen. Sehingga, dikhawatirkan ketika seorang Bintara intelijen memberikan analisis intelijennya, analisis tersebut menjadi kurang tajam

dan kurang mendalam, walaupun ketika proses Diktuk, materi tentang fungsi teknis Intelijen telah diberikan, namun dapat dikatakan hanya kulit-kulitnya saja.

Ketajaman analisa seorang anggota intelijen sangat menentukan langkah apa yang akan diambil oleh pemegang rantai komando. Karena berdasarkan laporan Intelijen-lah maka dapat memberikan gambaran situasi yang sedang terjadi secara jelas. Apabila seorang anggota intelijen dalam memberikan analisa tidak mendalam, maka tentu akan berakibat fatal dan membahayakan. Banyak hal yang menjadi kendala dalam proses pendidikan dasar seorang Bintara Intelijen, kelengkapan peralatan Intelijen yang dimiliki oleh Pusdik Intelijen Lemdiklat Polri masih belum lengkap, sementara perkembangan dunia intelijen sangat begitu cepat. Selain itu minimnya *alins alongins* juga sedikit menghambat kegiatan belajar mengajar. *Alins* Polri sendiri bermakna alat instruksi, yaitu alat atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran, untuk memperlancar pembelajaran agar peserta didik lebih mudah dalam menerima dan memahami materi pelajaran sehingga memiliki kompetensi yang diharapkan. Sedangkan *alongins* adalah alat penolong instruksi atau benda yang digunakan untuk membantu atau menolong penggunaan *alins* (Perkap Nomor 20 Tahun 2007).

Berdasarkan konsep tersebut, peneliti mendasarkan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ketercapaian program Dikbangspes bagi Bintara dasar Intelijen, yang akan mengangkat judul penelitian “**Evaluasi Program Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Bintara Dasar Intelijen (Densus 88 AT) di Pusdik Intelijen Lemdiklat Polri**” sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai masukan bagi instansi terkait, dalam rangka pengendalian program serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya setelah mengikuti program tersebut.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian evaluasi ini akan berfokus pada ketercapaian program Dikbangses Bintara Dasar Intelijen (Densus 88 AT) dalam hal ini adalah dampak Dikbangses Bintara Dasar Intelijen (Densus 88 AT) yang diselenggarakan terhadap pembentukan kompetensi serta pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Bintara Dasar Intelijen, yang akan dilihat melalui sub fokus:

- a. Reaksi peserta didik terhadap program Dikbangses Bintara Dasar Intelijen (Densus 88 AT).
- b. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti program Dikbangses Bintara Dasar Intelijen (Densus 88 AT).
- c. Perubahan perilaku serta sikap peserta didik dalam pelaksanaan pekerjaan setelah mengikuti Dikbangses Bintara Dasar Intelijen (Densus 88 AT).
- d. Dampak positif perubahan perilaku peserta didik terhadap kinerja dirinya dan instansinya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana tanggapan atau reaksi peserta didik Dikbangses Bintara Dasar Intelijen (Densus 88 AT) terhadap program diklat yang diselenggarakan ?
- b. Bagaimana hasil pembelajaran peserta didik Dikbangses Bintara Dasar Intelijen (Densus 88 AT) setelah mengikuti program Dikbangses ?
- c. Bagaimana perubahan perilaku peserta didik Dikbangses Bintara Dasar Intelijen (Densus 88 AT) saat melaksanakan tugas di tempat kerja setelah mengikuti program Dikbangses ?
- d. Bagaimana dampak atau hasil yang ditimbulkan oleh peserta Dikbangses atas perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti program Dikbangses Bintara Dasar Intelijen (Densus 88 AT) ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian evaluasi ini bertujuan untuk mengungkap dampak Dikbangses dalam pembentukan kompetensi kerja pesertanya, maka manfaat penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan informasi, analisa dan evaluasi bagi Lemdiklat Polri pada umumnya serta Pusdik Intelijen Lemdiklat Polri pada khususnya tentang faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor penghambat program Dikbangses Bintara Dasar Intelijen (Densus 88 AT).
- b. Sebagai bahan masukan atau rekomendasi bagi perencana program untuk melakukan modifikasi atau pembaharuan terhadap program Dikbangses.

- c. Sebagai bahan informasi bagi Lemdiklat Polri dalam pelaksanaan program.
- d. Sebagai masukan bagi widyaiswara/pendidik dalam lingkungan Lemdiklat Polri dalam pengembangan bahan ajar, pengembangan metoda pembelajaran, dan pengembangan soal-soal uji kompetensi dalam pembelajaran.
- e. Sebagai bahan masukan bagi pembina fungsi (dalam hal ini Baintelkam Mabes Polri) dan pengguna lulusan (dalam hal ini Densus 88 AT) untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan kompetensi para Bintara Intelijen melalui program Dikbangses Bintara Dasar Intelijen (Densus 88 AT).
- f. Sebagai bahan pengembangan lebih lanjut bagi praktisi di bidang evaluasi khususnya evaluasi program pengembangan SDM dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.5 Keterbaruan Penelitian

Penelitian sebelumnya berfungsi untuk analisa dan memperkaya pembahasan penelitian, serta membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini disertakan tujuh jurnal (Internasional dan Nasional) penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan bidang penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Jurnal - jurnal tersebut antara lain :

- a. Penelitian dengan judul *Russia's intelligence illegals program: an enduring asset*. Ditulis oleh Kevin P. Riehle dan dipublikasikan pada jurnal *Intelligence and National Security : Taylor and Francis* pada tahun 2020. Peneliti menjelaskan bahwa artikel ini mengeksplorasi nilai abadi dari program ilegal intelijen Rusia, dapat disimpulkan bahwa urgensi negara Rusia untuk mempekerjakan secara ilegal setidaknya sama besar sampai dengan hari ini. Kemajuan teknologi telah membuat operasi intelijen secara klandestin semakin berisiko. Namun demikian, program ilegal Rusia ini telah mengatasi tantangan dan kompromi – kompromi yang dilakukan sebelumnya, dan para pemimpin Rusia hari ini terus mengedepankan program ilegal ini dari masa lalu dan sekarang. Akibatnya, karena berbagai alasan - historis dan praktis - sangat tidak mungkin bahwa Rusia akan menggantikan program ilegal intelijen yang masih dibutuhkan hingga saat ini. Program yang dilakukan oleh Rusia ini menjelaskan bagaimana seseorang yang dilatih secara khusus

(petugas intelijen atau agen) yang hidup di bawah instruksi dari badan intelijen, dan dengan bantuan intelijen, di negara tertentu dengan dokumen identitas yang berisi identitas diri yang baru khususnya, dan umumnya untuk menyembunyikan agen tersebut dari pihak berwenang dan orang-orang di sekitarnya pada negara, nama keluarga sejatinya, dan rincian biografi, orang – orang ini menciptakan kondisi untuk melakukan intelijen dari posisi ilegal (Riehle, 2020).

- b. Penelitian dengan judul *The Intelligence Officer Training Corps : An ROTC-Style Program For The IC* yang di tulis oleh Carl J. Jensen pada tahun 2011 dan diambil di *Routledge Taylor and Francis*. Jensen menjelaskan bahwa Untuk mengembangkan personel intelijen baik itu laki – laki dan perempuan secara moral dan mental untuk peran sebagai kecerdasan perwira dan pemimpin di komunitas intelijen Amerika dan untuk menanamkan mereka cita-cita kehormatan, keberanian, kesetiaan, dan komitmen tertinggi untuk keunggulan. Dengan penekanan pada persiapan moral, kehormatan, dan keberanian, yang diusulkan pernyataan mencerminkan sejauh mana seluruh program didasarkan pada prinsip etika yang kuat. Misi ini konsisten dengan niat dan bahasa literal, dan sangat penting untuk memastikan Analisis yang tidak memihak dan tidak dipolitisasi. Juga, itu mencerminkan keberanian yang sering diperlukan ketika seorang perwira Intelijen harus menyampaikan pesan yang tidak populer. Pendidikan ini mengedepankan bagaimana peningkatan skill seorang personel intelijen di lapangan maupun pada komunitas intelijen di Amerika Serikat dalam menyampaikan bahan keterangan intelijen dengan memberikan beasiswa serta peningkatan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan perkembangan situasi yang ada (Jensen, 2011).
- c. Penelitian dengan judul *Intelijen Dalam Pusaran Demokrasi Di Indonesia Pasca Orde Baru*. Ditulis oleh Diandra Megaputri Mengko, Ikrar Nusa Bhakti, Indria Samego, Sri Yanuarti, Sarah Nuraini Siregar, Muhamad Haripin dan publikasikan pada *Jurnal Penelitian Politik : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia* pada tahun 2016. Dalam Penelitian ini menjelaskan

bahwa intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul “Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”. Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi Intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran Intelijen (Bhakti dan Mengko, 2016).

- d. Penelitian dengan judul *The benefit of intelligence officers Assessing their contribution to success through actionable intelligence*. Ditulis oleh A. Johannes Bottema dan Cody W. Telep yang diambil pada *Policing: An International Journal : Emerald Insight* pada tahun 2018. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana petugas intelijen terintegrasi di tingkat patroli yang berkontribusi pada kasus yang berhasil dengan cara berbagi informasi. Penelitian ini menggunakan regresi logistik multinomial untuk menganalisis hasil dari tiga tahun Laporan Petugas Intelijen (IOR) yang diajukan oleh petugas yang dilatih di Phoenix pada program petugas intelijen di departemen kepolisian. Pemanfaatan intelijen dan personil intelijen dalam penegakan hukum adalah kunci pengembangan modern yang sebagian besar belum diteliti oleh para akademisi. Meskipun kekurangan dokumentasi studi,

sangat penting untuk mengevaluasi konsep tersebut untuk lebih memahami cara lembaga dapat dipimpin oleh intelijen. Ini sangat penting ketika bukti, seperti pada penelitian ini, menunjukkan bahwa personel intelijen memiliki kemampuan untuk meningkatkan keberhasilan dalam hal pemecahan kasus. Banyak yang harus dilakukan untuk memahami potensi personel sehingga organisasi dapat mengoptimalkan cara intelijen digunakan sehingga bermanfaat dan efisien secara maksimum (Bottema & Telep, 2018).

- e. Penelitian dengan judul *Evaluasi Pelatihan (Training) Level I berdasarkan Teori The Four Levels Kirkpatrick* yang ditulis oleh Umi Widyastuti dan Dedi Purwana ES yang di Publikasikan pada tahun 2015 melalui *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta*. Peneliti menjelaskan bahwa pelatihan merupakan aspek penting dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pada organisasi, sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Ini harus diatur secara efektif sesuai dengan kebutuhan anggota organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelatihan bagi siswa yang diselenggarakan oleh Pusat Sumber Belajar Universitas Negeri Jakarta (PSB UNJ); dan bertujuan untuk mengetahui keefektifan pelatihan di tingkat II, berdasarkan teori *Four Levels Kirkpatrick*. Pelatihan yang peneliti amati dalam penelitian ini mencakup pelatihan pembelajaran berbasis sains, pelatihan pembelajaran berbasis proyek, pelatihan pembelajaran berbasis internet, pelatihan media sederhana dan pelatihan penilaian otentik. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa yang berpartisipasi dalam program ini yang berasal dari seluruh fakultas di UNJ. Dengan menggunakan *purposive sampling*, sampel dipilih secara acak berdasarkan jenis pelatihan yang diberikan oleh PSB UNJ. Jumlah sampel yang diperoleh adalah 110 siswa. Dengan membandingkan data pra dan pasca pengujian data menggunakan uji-t berpasangan, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pengetahuan dan keterampilan yang signifikan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan (Widyastuti, 2015).
- f. Penelitian dengan judul *Penerapan Model Evaluasi Kirkpatrick Empat Level Dalam Mengevaluasi Program Diklat Di Balai Besar Pelatihan Pertanian*

(BBPP) Lembang. Ditulis oleh Ramayana Ritonga, Asep Saepudin dan Uyu Wahyudin serta dipublikasikan pada tahun 2018 melalui *Jurnal Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Malang*. Peneliti menjelaskan bahwa Dalam meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang menjadi tempat yang tepat sasaran untuk melaksanakan pelatihan teknis dan pelatihan fungsional di bidang pertanian. Sudah terbukti BBPP Lembang banyak sekali mencetak tenaga yang handal dibidang pertanian, hal ini bisa dijadikan sebagai indikator keberhasilan dari lembaga Diklat ini, bukan hanya itu, kesejahteraan para petani pun sudah meningkat. BBPP Lembang menjadi salah satu wadah yang bisa dijadikan sebagai lapangan kerja yang membantu mengurangi jumlah warga yang tidak mendapatkan pekerjaan. Untuk meningkatkan pelatihan berkelanjutan dan tepat sasaran BBPP Lembang senantiasa melakukan kegiatan evaluasi yang bertujuan melihat keberhasilan program yang telah diselenggarakan dan menindaklanjuti kelemahan-kelemahan yang didapat ketika proses evaluasi berlangsung baik di awal program dan maupun diakhir program. Penerapan Model Evaluasi Kirkpatrick Empat Level digunakan sebagai kerangka acuan untuk mengevaluasi program, dimana evaluasi pada level 1 dan 2 akan mengasilkan informasi untuk organisasi tentang penyelenggaraan pelatihan baik diawal-tengan dan akhir. Sedangkan pada level 3 dan 4 menghasilkan informasi yang berfokus pada dampak pelatihan bagi organisasi dan peserta pelatihan (Ritonga, 2018).

- g. Penelitian dengan judul *Evaluating the effectiveness of undergraduate clinical education programs*. Ditulis oleh John W. Ragsdale, Andrea Berry, Jennifer W. Gibson, Christiane R. HerberValdez, Lauren J. Germain, Deborah L. Engle yang dipublikasikan pada *Medical Evaluation Online : Taylor And Francis* pada tahun 2020. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sekolah kedokteran harus menggunakan berbagai langkah untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum klinis mereka. Baik ukuran hasil maupun ukuran proses, harus dimasukkan, dan ini dapat diatur sesuai dengan model evaluasi pelatihan empat tingkat yang dikembangkan oleh Donald

Kirkpatrick. Mengelola data evaluasi mengharuskan lembaga untuk menggunakan strategi yang disengaja untuk memantau sinyal secara *real-time* dan data agregat sehingga keputusan yang tepat dapat dibuat. Langkah-langkah masa depan dalam evaluasi program mencakup peningkatan penekanan pada pasien dan umpan balik *multi-source*, serta integrasi yang lebih baik dari sumber data yang ada (Ragsdale, Berry, Gibson, HerberValdez, Germain, 2020).

Dari beberapa penelitian diatas, Peneliti menjadikannya sebagai bahan acuan dan bahan pembanding dengan bidang yang akan diteliti. Terdapat relevansi antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu tentang dunia intelijen serta evaluasi program. Beberapa hal yang membedakan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada program Diklat yang dilaksanakan, serta pertanyaan penelitian yang menjadi fokus peneliti.